

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : **Perempuan dalam Parlemen dan Gaung Kebijakan Inklusif**

Pemateri :

1. **Diah Pitaloka, Anggota DPR-RI 2019-2024, Komisi VIII, Fraksi PDI-P**
2. **Yolanda Panjaitan, Peneliti Cakra Wikara Indonesia**
3. **Nopitri Wahyuni, Peneliti Sosisa The Indonesian Institute**

Moderator : **M Rifki Fadhillah, Peneliti Ekonomi The Indonesian Institute**

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh sebanyak 47 peserta dengan berbagai latar belakang yang Berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Diah Pitaloka, Anggota DPR-RI Komisi VIII, Fraksi PDI-P

- ✓ Sila kelima Pancasila sangat *relate* dengan tema pembahasan, dimana makna inklusif melekat pada kebijakan pada dasarnya yang menysasar pada perempuan.
- ✓ Anggota perlemen perempuan, mempunyai kecenderungan *political will* untuk membangun kebijakan yang inklusif.
- ✓ Inti kebijakan inklusifitas, berkaitan dengan toleransi, demokrasi yang tidak meninggalkan atau menengahkan tiap-tiap posisi warga negara
- ✓ Seringkali peran perempuan dalam arus kekuasaan tidak disadari, padahal perempuan sendiri memiliki peran sentral dalam tiap lini dan aspek kehidupan berbangsa, seperti dalam hal ekonomi makro.
- ✓ Tidak selamanya peran perempuan dalam kaitan membangun kebijakan inklusif, harus berada dalam kursi kekuasaan puncak seperti di DPR. Peran-peran lain diluar kursi kekuasaan secara langsung juga dapat mempengaruhi pembangunan kebijakan yang inklusif.
- ✓ Meski demikian, satu hal yang saat ini mengalami perkembangan, yakni preferensi perempuan sekarang di badan legislative semakin menguat dari tahun ke tahun.

Yolanda Panjaitan, Peneliti Cakra Wikara Indonesia

- ✓ Tren keterpilihan perempuan di DPR-RI sejak 10 tahun terakhir mengalami peningkatan, yang mulai dan banyak diakomodir oleh partai PDIP, Golkar, Gerindra. Nasdem.PKB dan Demokrat.
- ✓ Kebijakan afirmasi pada dasarnya dibuat untuk meningkatkan angka keterpilihan perempuan, sehubungan dengan itu satu-satunya partai yang sejauh ini memenuhi persentase 30 persen dalam hal keterwakilan perempuan, dilakukan oleh Nasdem di Pemilu 2019. Dengan persentase sekitar 32 persen.
- ✓ Meski demikian, kebijakan perempuan belum diterapkan pada pemilihan DPD, dan ditahun 2019 diketahui terdapat beberapa provinsi yang tidak memiliki sama sekali keterwakilan perempuan, yakni Aceh kep babel, riau, bali dan kalsel, Sulawesi tengah, Sulawesi barat dan Kalimantan barat.
- ✓ Dalam hal pemilihan DPRD, provinsi Kalimantan tangan, dan Sulawesi selatan adalah dua dari sekian provinsi yang berhasil memenuhi kebijakan afirmasi.

- ✓ Catatan untuk keterwakilan perempuan di DPRD KAB/KOTA, masih terdapat 16 kabupaten/kota yang sama sekali tidak memiliki keterwakilan atau kursi perempuan.
- ✓ Dalam hal isu strategi, keterwakilan perempuan yang sekarang menduduki kursi legislative memiliki pekerjaan rumah yang harus segera dikerjakan, salah satunya terkait urgensi pengesahan RUU PKS. RUU Masyarakat Adat, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, untuk mengakomodir dan melindungi kelompok-kelompok terpinggirkan.
- ✓ Selain itu, keterwakilan perempuan juga perlu mendorong pelibatan perempuan lebih jauh dalam hal pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan public yang strategis, baik yang secara langsung mengaitkan perempuan sebagai tajuknya maupun yang tidak langsung, seperti RUU KUHP, RUU Parpol, wacana pengembalian GBHN, dan Pilkada tidak langsung.
- ✓ Jika dalam hal demokrasi saja, perempuan belum tentu mendapatkan tempat untuk mewakili perannya, apalagi dalam system yang tidak demokratis. Oleh karena itu perempuan perlu untuk berjuang melawan kebijakan-kebijakan yang tidak inklusif.

Nopitri Wahyuni, Peneliti Sosisa The Indonesian Institute

- ✓ Kebijakan inklusif terhadap perempuan dapat diukur dengan *political will* parlemen dan pemerintah dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU PKS.
- ✓ Dalam hal itu, peran media memperlihatkan di bulan Januari dan februari, RUU PKS masuk dalam proses pembahasan di parlemen, dan di bulan September memiliki momen dalam yang sangat besar untuk disahkan, namun sayangnya urung.
- ✓ Studi monitoring media TII, memperlihatkan bahwa isu RUU PKS memiliki atensi yang sangat tinggi dari masyarakat. Beberapa ada yang mendukung, dan sebagian ada juga yang menolak.
- ✓ Pemberitaan media juga memperlihatkan adanya polarisasi wacana yang terbagi atas pemberitaan yang positif, negative dan netral.
- ✓ Secara umum peran media memiliki peran dan keberpihakan dalam mendorong dan mendesak pengesahan serta urgensi RUU PKS dan gaung feminisme.
- ✓ Meski demikian, peran media juga sekaligus memberi ruang untuk pihak-pihak yang kontra terhadap wacana RUU PKS, sehingga sampai saat ini cenderung membuat polarisasi dan menghambat proses pengesahan RUU PKS.
- ✓ Adapun terkait tantangan perempuan dalam hal berperan sebagai legislator, masih kurang didengar suaranya, sehingga kedepan gaung kebijakan inklusif tidak hanya perlu mendorong representasi keterwakilan, namun juga representasi ide dan gagasan perempuan.
- ✓ Selain itu, interaksi perempuan dan antar organisasi-organisasi masyarakat yang memiliki *concern* terhadap isu perempuan perlu ditingkatkan dan digiatkan.

FORUM DISKUSI

1. Rifqi (TII)

Terkait bias eksistensialisme, bagaimana peran anggota parlemen laik-laki selama ini dalam melihat kebijakan-kebijakan inklusif terhadap perempuan?

2. Petra (Mahasiswa UKI)

Bisakah dijabarkan lebih rinci terkait definisi perempuan dan perannya terkait kebijakan inklusif?

3. Dinda (TII)

Dari periode sekarang, apakah perempuan dalam parlemen sendiri mempunyai upaya-upaya khusus dalam mendorong kebijakan-kebijakan yang belum tentu terdapat atau menekankan kata perempuan di dalamnya?

Tanggapan

1. Diah Pitaloka

Terkait dengan patriarki, perlu ada penelitian yang mendalam untuk mengukur dan menilai system nilai kita hari ini apakah kental dan dominan berhadapan dengan patriarki. Adapun terkait RUU PKS, perlu didesak kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas dengan menggunakan Pasal *carry over* yang baru diakomodir dalam UU P3. Dengan demikian proses pembahasannya tidak harus dimulai dari awal kembali.

Dalam konteks sosialnya, wacana RUU PKS juga perlu semakin digaungkan substansinya oleh media, bukan hanya sekedar hanya menyiarkan sensasi-sensai semata. Dalam hal representasi dan keterwakilan perempuan, perlu adanya Gerakan social dan kemasyarakatan yang mendorong dan mendukung peran perempuan yang seutuhnya dalam hal mewakili keberpihakan politik perempuan. Sebab selama ini kerterwakilan perempuan masih sering dimanfaatkan, ditunggangi dan dikemas oleh mereka yang justru tidak memiliki kepentingan dengan keterwakilan perempuan.

2. Yolanda Panjaitan

Keterwakilan perempuan selama ini perlu direnungkan kembali, sebab keterwakilan perempuan tidak selamanya berhubungan dengan angka-angka semata. Proses pengambilan keputusan di parlemen selama ini tidak mewakili ide dan gagasan perempuan, meski secara jumlah mengalami perkembangan dan perbaikan.

Oleh karena itu, terpong kebijakan afirmasinya perlu segera dibenahi.

3. Nopitri Wahyuni

Perdebatan masyarakat dalam tataran RUU PKS, sayangnya masih diwarnai dengan wacana yang timpang dan bias dari yang seharusnya. Upaya kedepan, perlu digodok peran masyarakat yang lebih eksta dalam hal meluruskan defnisi-definisi dan artia yang sebenarnya dalam RUU PKS yang sedang diperjuangkan.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

~ TERIMA KASIH ~